



RENCANA AKSI

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KAB. BOALEMO



TAHUN 2025

**MONEV RENCANA AKSI RENCANA AKSI BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN
PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BOALEMO TAHUN 2025**

Perjanjian Kinerja merupakan pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu, dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya.

Adapun Tujuan Perjanjian Kinerja adalah untuk :

1. Meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur,
2. Komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah,
3. Dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi;
4. Tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.

Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Boalemo telah menandatangani Perjanjian Kinerja Tahunan Tahun 2025 dengan Bupati Boalemo. Berdasarkan Perjanjian Kinerja tersebut, Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Boalemo telah membuat Perjanjian Kinerja antara Kepala Badan dengan Pejabat Eselon III dan Eselon IV.

Berdasarkan Perjanjian Kinerja antara Kepala Badan Keuangan dengan Eselon III dan Eselon IV tersebut, maka kami menyusun Rencana Aksi Kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Boalemo. Rencana Aksi Kinerja tersebut menghubungkan antara rencana outcome yang ada dalam Perjanjian Kinerja dengan kegiatan Tahun 2025.

Dengan demikian diharapkan Rencana Aksi Kinerja Tahun 2025 menjadi acuan bagi Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Boalemo dalam melaksanakan program dan kegiatan selama 1 tahun berjalan.

Tilamuta, Januari 2025

**Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Dan
Pendapatan daerah Daerah Kabupaten
Boalemo**



Drs. MOHAMMAD TAUFIQ KUMALI, MM
NIP. 19691114 199010 1 001

RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran	Program/Kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Anggaran	Jadwal Kegiatan				Penanggung Jawab
								TW I	TW II	TW III	TW IV	
1	Meningkatkan Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja serta pelayanan publik	Nilai SAKIP OPD	B	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pelaksanaan Penunjang Adminitrasi Perkantoran di Badan Keuangan Dan Aset Daerah	100%	29.140.148.719,00	√	√	√	√	
2		Persentase Tindak Lanjut Temuan Inspektorat/BPK/BPKP	B	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang tepat waktu	100%	268.839.670,00	√	√	√	√	
3		Persentase Penerimaan PAD Badan Keuangan dan Aset Daerah	100%	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	192.164.070,00	√	√	√	√	
4		Persentase Barang Milik Daerah dalam Keadaan Baik di Lingkungan BKAD Kab.Boalemo	100%	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	76.675.600,00	√	√	√	√	
5		Persentase ASN yang mengikuti Bimbingan teknis di lingkungan BKAD	80	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan yang tepat waktu	100%	22.778.208.249,00	√	√	√	√	
6				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	22.778.208.249,00	√	√	√	√	
7				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian PD	100%	164.874.725,00	√	√	√	√	
8				Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	164.874.725,00	√	√	√	√	
9				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Perlengkapan Kantor	100%	307.720.000,00	√	√	√	√	
10				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	15 Paket	98.000.000,00	√	√	√	√	
11				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	209.720.000,00	√	√	√	√	
12				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah di OPD	100%	5.325.756.075,00	√	√	√	√	
13				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	5.325.756.075,00	√	√	√	√	
14				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah di OPD dalam kondisi baik	100%	294.750.000,00	√	√	√	√	
15				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya Dipelihara	3 Unit	96.800.000,00	√	√	√	√	
16				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	197.950.000,00	√	√	√	√	
17				PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase Penepatan APBD Tepat Waktu	100%	120.023.939.481,00	√	√	√	√	
18	Meningkatnya tata kelola keuangan Daerah yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel	Kesesuaian Dokumen Perencanaan dan Penganggaran	6,6	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Jumlah Dokumen Penganggaran Keuangan Daerah	4 Dokumen	1.156.085.660,00	√	√	√	√	
19		Pengalokasian Anggaran Belanja Dalam APBD	20	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	1 Dokumen	167.040.000,00	√	√	√	√	

20	Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah	5,9	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	1 Dokumen	145.129.000,00	√	√	√	√	
21	Penyerapan Anggaran	20	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	1 Dokumen	519.394.005,00	√	√	√	√	
22	Kondisi Keuangan Daerah	5,4	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	1 Dokumen	324.522.655,00	√	√	√	√	
23	Opini Badan Pemeriksa Keuangan Atas LKPD	15	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	1 Laporan	699.998.880,00	√	√	√	√	
24			Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	1 Dokumen	185.555.755,00	√	√	√	√	
25			Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	1 Dokumen	126.058.000,00	√	√	√	√	
26			Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	1 Dokumen	58.840.785,00	√	√	√	√	
27			Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	138 Orang	329.544.340,00	√	√	√	√	
28			Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Jumlah dokumen pelaporan keuangan daerah	1 Laporan	719.836.741,00	√	√	√	√	
29			Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	47 Laporan	264.703.438,00	√	√	√	√	
30			Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	2 Dokumen	203.338.310,00	√	√	√	√	
31			Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	1 Dokumen	62.289.503,00	√	√	√	√	
32			Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	2 Dokumen	40.251.490,00	√	√	√	√	
33			Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	1 Dokumen	112.732.000,00	√	√	√	√	
34			Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	57 Orang	36.522.000,00	√	√	√	√	

35	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Optimalisasi Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	1 Tahun	117.448.018.200,00	√	√	√	√	
36	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	2 Laporan	114.615.518.200,00	√	√	√	√	
37	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	1 Laporan	1.000.000.000,00	√	√	√	√	
38	Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	2 Laporan	1.832.500.000,00	√	√	√	√	
39	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase inventarisasi aset milik daerah	100%	700.000.331,00	√	√	√	√	
40	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen pengelolaan barang milik daerah	1 Dokumen	700.000.331,00	√	√	√	√	
41	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	1 Dokumen	200.003.862,00	√	√	√	√	
42	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	2 Dokumen	99.824.160,00	√	√	√	√	
43	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	1 Laporan	149.999.065,00	√	√	√	√	
44	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	1 Laporan	100.907.540,00	√	√	√	√	
45	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	1 Laporan	149.265.704,00	√	√	√	√	
46	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Peningkatan PAD	100%	700.000.000,00	√	√	√	√	
47	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah Dokumen Pengelolaan Pendapatan	1 Dokumen	700.000.000,00	√	√	√	√	
48	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	1 Laporan	51.627.709,00	√	√	√	√	
49	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	3 Unit	111.036.324,00	√	√	√	√	
50	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Laporan	196.948.975,00	√	√	√	√	
51	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	1 Laporan	340.386.992,00	√	√	√	√	

Kab.Boalemo,

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah
Kab.Boalemo



Dis. Muhammad Taufiq Kumali, MM
Nip. 19691114 199010 1 001